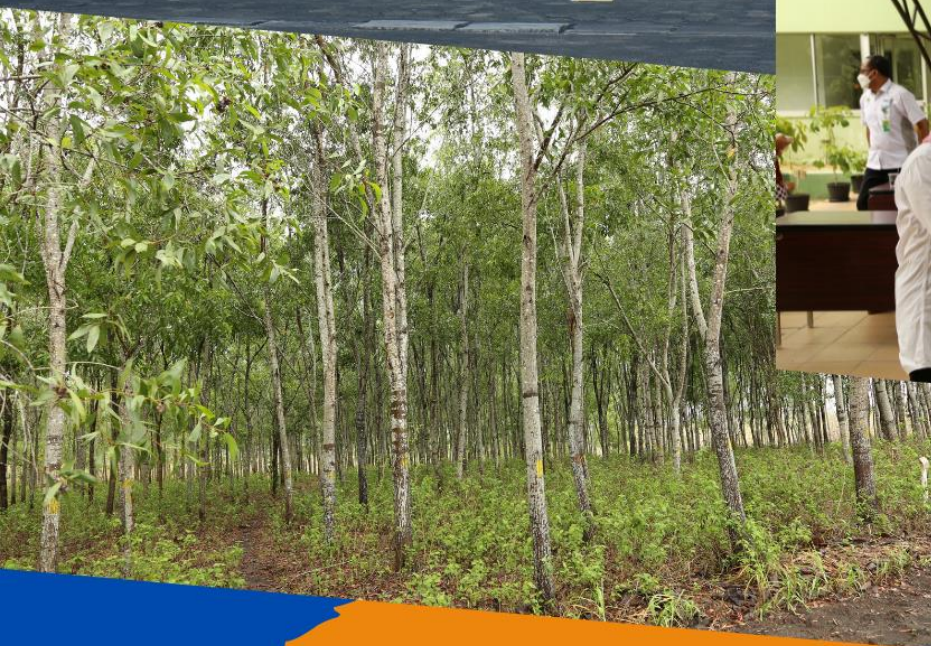


RENCANA STRATEGIS Tahun 2022-2024

BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN KEHUTANAN



**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN KEHUTANAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN KEHUTANAN
Nomor : SK. 040/BBPSIK/BU/REN.0/03/2022**

**TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR
INSTRUMEN KEHUTANAN (REVISI) TAHUN 2022-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN KEHUTANAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/BSI/SET.13/KUM.1/2022 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 5 (2) Peraturan Menteri LHK Nomor:P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 dinyatakan Pimpinan Unit Kerja Eselon II atau UPT wajib menyusun Renstra Unit Kerja Eselon II atau Renstra UPT dengan berpedoman pada Renstra Unit Kerja Eselon I;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Rencana Strategis Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan Tahun 2022-2024 dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN KEHUTANAN TAHUN 2022-2024 TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN KEHUTANAN (REVISI) TAHUN 2022-2024
- PERTAMA : Rencana Strategis Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan (Revisi) Tahun 2022-2024 merupakan dokumen perencanaan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan untuk periode 3 (tiga) tahun yakni Tahun 2022 sampai dengan 2024 yang dalam penyusunannya tetap berpedoman pada Rencana Strategis Badan Standardisasi Instrumen Kehutanan.
- KEDUA : Rencana Strategis Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan Tahun 2022-2024 secara garis besar memuat 5 (lima) Bab terdiri atas:
- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : VISI, MISI TUJUAN 2022-2024
BAB III : KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN
BAB IV : TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
BAB V : PENUTUPAN
- KETIGA : Rencana Strategis Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja tahunan kurun waktu 2022-2024 dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman, Yogyakarta
Pada tanggal : 16 Maret 2022



RETTISA MUTIARADEVI, S.Kom., M.CA.
NIP. 197410126 199903 2 003

Lampiran Keputusan

Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan

Nomor : SK. 040/BBPSIK/BU/REN.0/03/2022

Tanggal : 16 Maret 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN KEHUTANAN

TAHUN 2022-2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas ridho-NYA, dokumen Rencana Strategis Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan (RENSTRA BBPSIK) Tahun 2022-2024 dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini.

Sesuai tugas BBPSIK dan sejalan Renstra yang disusun untuk tahun 2022-2024 ini maka BBPSIK akan melakukan pengujian dan validasi standar instrumen dan metode verifikasi penilaian kesesuaian dan tindakan korektif penerapan standar instrumen di bidang kehutanan untuk memastikan penerapan standar instrumen bagi stakeholders di seluruh wilayah Indonesia khususnya dibidang Kehutanan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan tersusunnya Renstra BBPSIK Tahun 2022-2024, penyelenggaraan kegiatan di BBPSIK dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan untuk 3 (tiga) tahun kedepan telah memiliki arah dan strategi serta tujuan. Akhirnya kepada semua pihak kami sajikan dokumen Renstra BBPSIK Tahun 2022-2024, semoga dapat bermanfaat.

Plt. Kepala Balai Besar Pengujian
Standar Instrumen Kehutanan,



Retisa Mutiaradevi, S.Kom., M.CA.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan dirancang sebagai instrumen kerja pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berimplikasi pada kualitas lingkungan hidup dan kecukupan luasan hutan. Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 1 Juli 2021 mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pengembangan, serta penerapan standar dan kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan (BBPSIK) sebagai salah satu unit pelaksana teknis dibawah BSILHK sesuai Permen LHK Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkedudukan di Yogyakarta dengan cakupan wilayah kerja seluruh Indonesia. BBPSIK mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan validasi standar instrumen dan metode verifikasi penilaian kesesuaian dan tindakan korektif penerapan standar instrumen di bidang kehutanan.

Rencana Strategis (RENSTRA) BBPSIK 2022-2024 Revisi disusun sebagai landasan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi BBPSIK yang merupakan acuan rencana program dan kegiatan tahunan tahun 2022-2024. RENSTRA 2022-2024 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat strategi atau peta jalan atau aksi yang akan ditempuh dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan yang akan dihadapi selama periode 2022-2024.

BBPSIK sebagai organisasi baru diberi mandat untuk memastikan instrumen-instrumen standar khususnya di bidang kehutanan layak untuk diimplementasikan, dapat diterapkan di lapangan oleh para pelaku usaha dan memastikan instrumen standar tersebut dapat diterima oleh para pelaku usaha di lapangan. Sebagai lembaga yang baru lahir, BBPSIK mempunyai sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan yang beragam, sarana prasarana yang memadai serta didukung oleh adanya 6 (enam) Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Akan tetapi dikarenakan sebagian sumber daya manusia yang semula dari jabatan fungsional peneliti dan teknisi yang beralih jabatan fungsionalnya ke dalam jabatan yang ada dalam struktur BBPSIK, serta adanya penyederhanaan birokrasi maka terdapat pula jabatan fungsional yang merupakan jabatan baru melalui penyetaraan, hal ini berdampak kepada belum optimalnya kompetensi atau pengetahuan yang cukup dari sisi sumberdaya manusia dalam membangun standar instrumen untuk mendukung tugas dan fungsi BBPSIK. Selain itu juga belum terbangunnya proses bisnis mengingat saat ini BSILHK sendiri masih dalam proses pengembangan mengerjakan tugas

dan fungsinya, belum terbangunnya database terkait standar instrumen, serta belum dikenalnya institusi BBPSIK oleh banyak stakeholders.

BBPSIK melaksanakan kegiatan yang meliputi 1) Standardisasi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan; 2) Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; serta 3) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Target kinerja BBPSIK untuk kegiatan Standardisasi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yaitu 2 (dua) produk, 2 (dua) lembaga, 6 (enam) unit dan 1 (satu) layanan. Target kinerja BBPSIK untuk kegiatan Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim yaitu 1 (satu) produk dan 1 (satu) lembaga. Target kinerja BBPSIK untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu 1 (satu) layanan umum, 1 (satu) layanan perkantoran dan 1 (satu) layanan sarana internal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Capaian Kegiatan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Tahun 2020-2021.....	8
1.3 Permasalahan dan Potensi	14
BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN 2022-2024	19
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK.....	19
2.2 Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program BSILHK	20
BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN	31
3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan BBPSIK	31
3.2. Pengarusutamaan	36
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	39
4.1. Target Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	40
4.2. Target Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	42
4.3. Target Program Dukungan Manajemen	44
BAB V. PENUTUP	53
LAMPIRAN.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Korelasi Pemanfaatan SDA dan Usaha Kehutanan terhadap Penurunan Kualitas Lingkungan dan Kerusakan Hutan	3
Gambar 2. Karakteristik Satuan Kerja BSILHK	4
Gambar 3. Stuktur Organisasi BBPSIK.....	6
Gambar 4. Arah Strategi Kebijakan	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keadaan Pegawai BBPSIK Berdasarkan Kelompok Jabatan (Struktural, Non Struktural, Fungsional dan Honorer).....	7
Tabel 2. Keadaan Pegawai BBPSIK Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Tabel 3. Capaian Kegiatan Penelitian dan Pengembangan BBPPBPTH Tahun 2020 -2021	9
Tabel 4. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen BSILHK	23
Tabel 5. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Pogram Pengelolaan Hutan Berkelanjutan BSILHK.....	24
Tabel 6. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Kualitas Lingkungan Hidup BSILHK.....	26
Tabel 7. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK	28
Tabel 8. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim BSILHK	29
Tabel 9. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan/Output BBPSIK.....	31
Tabel 10. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Pengendalian dan Penilaian Standar Produk, Sistem dan Prosedur dan Uji Pelaksanaan Standar Instrumen Produk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di BBPSIK.....	40
Tabel 11. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Pengendalian dan Penilaian Standar Lembaga Pelaksana Standar Instrumen Produk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di BBPSIK	41
Tabel 12. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Pengelolaan KHDTK	41
Tabel 13. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Validasi Standar Hasil Hutan, Jasa Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati Pengelolaan Hutan di KHDTK	42

Tabel 14. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Pengendalian dan Penilaian Standar Produk, Sistem dan Prosedur dan Uji Kebencanaan dan Perubahan Iklim.....	43
Tabel 15. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Pengendalian dan Penilaian Standar Lembaga Pelaksana Instrumen Penanganan Bencana, Adaptasi, dan Mitigasi Perubahan Iklim.....	43
Tabel 16. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Perencanaan Program dan Kegiatan.....	45
Tabel 17. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Anggaran	45
Tabel 18. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	46
Tabel 19. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Administrasi Keuangan	46
Tabel 20. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Administrasi Tata Usaha Rumah Tangga dan BMN.....	47
Tabel 21. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Administras Kerjasama Teknik.....	48
Tabel 22. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian.....	49
Tabel 23. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Pengelolaan Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat.....	50
Tabel 24. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Gaji dan Tunjangan	51
Tabel 25. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	51
Tabel 26. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Layanan Sarana dan Prasarana Internal	52

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Jangka Panjang (20 Tahun), KHDTK Gunung Kidul Blok Playen D.I.Yogyakarta, KHDTK Blok Watusipat D.I.Yogyakarta dan KHDTK Kaliurang D.I.Yogyakarta .. 55
- Lampiran 2. Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Jangka Panjang (20 Tahun), KHDTK Wonogiri, Jawa Tengah, KHDTK Padekanmalang Situbondo Jawa Timur, KHDTK Sumberwringin Bondowoso Jawa Timur 58
- Lampiran 3. Capaian Kegiatan Prioritas Nasional BBPPBPTH “Implementasi IPTEK Hasil Hutan, Jasa Lingkungan, dan Keanekaragaman Hayati” Tahun 2021 61

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK 11/2020).

Di sisi lain dalam perwujudan pembukaan kran kesempatan kerja yang seluas-luasnya untuk perkembangan ekonomi dan investasi tersebut, perlu dilakukan pemantauan dan pengetatan potensi dampak lingkungan hidup dan kehutanan yang dapat terjadi. Kegiatan-kegiatan berusaha harus dilakukan dengan cara ramah lingkungan (*eco-friendly*) dan tidak merusak atau mencemari lingkungan (*eco-friendly waste*). Kegiatan pemanfaatan khususnya sumber daya hutan agar dilakukan secara berkelanjutan dan lestari.

Untuk mengantisipasi dampak lingkungan dan pemanfaatan hutan tersebut diperlukan rambu-rambu berupa standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan. Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan dirancang sebagai instrumen kerja pengendalian dan

pemanfaatan sumberdaya alam yang berimplikasi pada kualitas lingkungan hidup dan kecukupan luasan hutan.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) disebutkan bahwa salah satu fungsi KLHK adalah menjalankan fungsi standarisasi instrumen lingkungan hidup dan kehutanan. Perpres tersebut, menyebutkan bahwa tugas penyelenggaraan koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang LHK dikerjakan oleh Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK).

Dengan demikian, pendekatan pembangunan bergeser pada kekuatan ekonomi, sosial dan lingkungan. UUCK 11/2020 mencakup 11 klaster yaitu penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, pengadaan lahan, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, kemudahan pemberdayaan perlindungan UMKM, investasi pemerintah, dan kawasan ekonomi. Dengan meningkatnya usaha-usaha kehutanan maka akan berdampak pada lingkungan dan kelestarian hutan.



Sumber Gambar RENSTRA BSILHK 2022 – 2024

Gambar 1. Korelasi Pemanfaatan SDA dan Usaha Kehutanan terhadap Penurunan Kualitas Lingkungan dan Kerusakan Hutan

BSILHK ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2021 tanggal 1 Juli 2021 dengan tugas menyelenggarakan koordinasi dan pengembangan, serta penerapan standar dan kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam menjalankan tugasnya BSILHK menyelenggarakan beberapa fungsi, salah satunya adalah fungsi: penyusunan kebijakan teknis rencana dan program perumusan dan pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BSILHK didukung Sekretariat BSILHK, 4 (empat) Pusat Standardisasi Instrumen, 2 (dua) Balai Besar, dan 13 Balai Tapak.



Gambar 2. Karakteristik Satuan Kerja BSILHK

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan (BBPSIK) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah BSILHK yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 26 Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BBPSIK mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian dan validasi standar instrumen dan metode verifikasi penilaian kesesuaian dan tindakan korektif penerapan standar instrumen di bidang kehutanan. Dalam menjalankan tugasnya, BBPSIK menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran pengujian dan validasi standar instrumen dan metode verifikasi penilaian kesesuaian dan tindakan korektif penerapan standar instrumen di bidang kehutanan;
- b. Pelaksanaan pengujian dan validasi standar instrumen dan peralatan penunjang penerapan standar instrumen di bidang kehutanan;
- c. Pelaksanaan pengujian dan validasi metode verifikasi penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang kehutanan;

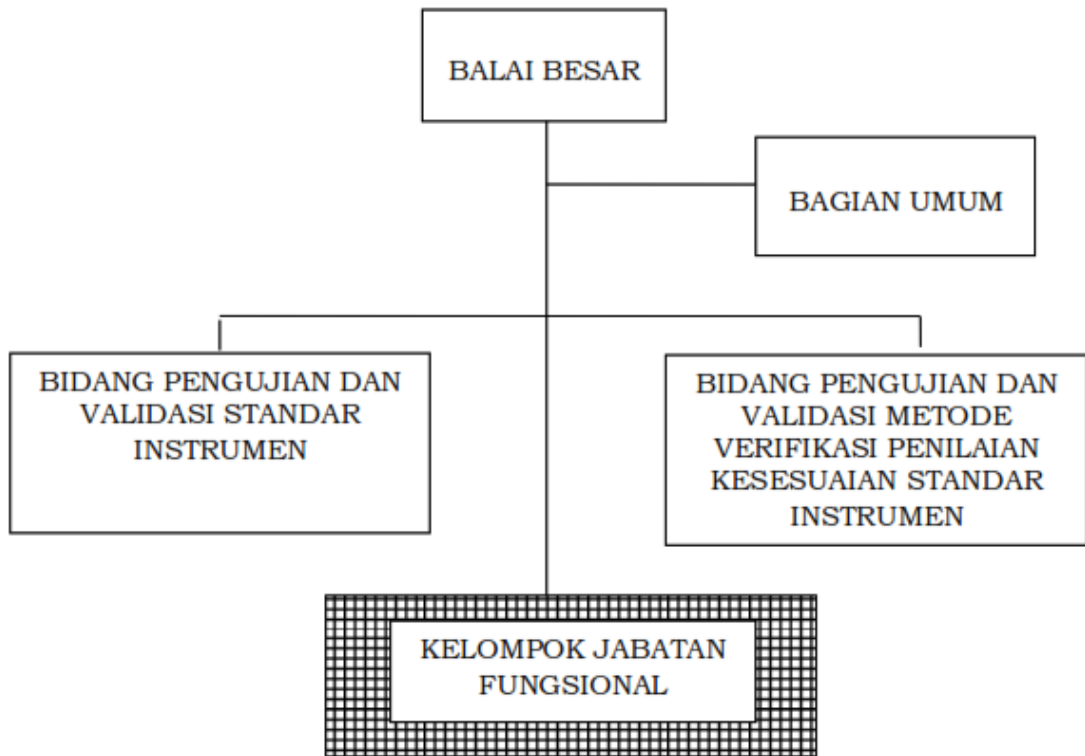
d. Pelaksanaan tindakan korektif penerapan standar instrumen di bidang kehutanan; dan

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi BBPSIK perlu menyusun rencana strategis (RENSTRA) 2022-2024 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat strategi atau peta jalan atau aksi yang akan ditempuh dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan yang akan dihadapi sampai dengan tahun 2024. Dasar penyusunan RENSTRA BBPSIK Tahun 2022-2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020-2024 dan revisinya, serta Renstra Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022-2024 dan revisinya, serta memperhatikan tugas dan fungsi dari BBPSIK sebagaimana diamanatkan dalam Permen LHK No 26 Tahun 2021.

1.1.1. Struktur Organisasi

BBPSIK berkedudukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar (eselon II.B) dan dibantu oleh 1 (satu) Kepala Bagian Umum (eselon III.B) dan 2 (dua) Kepala Bidang Teknis (eselon III.B) yaitu Kepala Bidang Pengujian dan Validasi Standar Instrumen dan Kepala Bidang Pengujian dan Validasi Metode Verifikasi Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen, serta kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari: Perencana, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Arsiparis, Pranata Komputer, Pustakawan, Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Pranata Keuangan APBN, Peneliti dan Teknisi.



Gambar 3. Stuktur Organisasi BBPSIK

1.1.2. Sumberdaya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BBPSIK didukung dengan sumberdaya manusia (SDM) sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) orang, data per bulan Desember 2021 terdiri dari tenaga struktural 3 (tiga), non struktural 37 (tiga puluh tujuh), fungsional 68 (enam puluh delapan), dan tenaga kontrak 16 (enam belas). Dari tenaga fungsional tersebut tercatat fungsional peneliti sebanyak 25 (dua puluh lima) yang beralih ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). SDM yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di lingkup BBPSIK sejumlah 100 (seratus) orang. Komposisi sumberdaya manusia di BBPSIK sebagaimana Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Keadaan Pegawai BBPSIK Berdasarkan Kelompok Jabatan (Struktural, Non Struktural, Fungsional dan Honorer)

No.	Kelompok Pegawai	Jumlah		Keterangan
		Orang	%	
1.	Tenaga Struktural / Non Struktural			
	a. Pejabat Struktural	3	3,57	
	b. Non Struktural	34	40,48	
2.	Tenaga Fungsional			
	a. Penyuluh Kehutanan	4	4,76	
	b. Calon Penyuluh Kehutanan	0	0,00	
	c. Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)	26	30,95	
	d. Calon Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)	0	0,00	
	e. Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL)	4	4,76	
	f. Calon Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL)	0	0,00	
	g. Perencana	2	2,38	
	h. Pustakawan	2	2,38	
	i. Calon Pustakawan	0	0,00	
	j. Analis Kepegawaian	0	0,00	
	k. Calon Analis Kepegawaian	0	0,00	
	l. Pranata Komputer	3	3,57	
	m. Calon Pranata Komputer	0	0,00	
	n. Arsiparis	2	2,38	
	o. Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa	1	1,19	
	p. Analis Pengelola Keuangan APBN	2	2,38	
	q. Pranata Keuangan APBN	1	1,19	
	Jumlah PNS dan CPNS	84	84,00	
3.	Honorer/Kontrak Kerja	16	16,00	
	Jumlah Total Pegawai	100	100,00	

Tabel 2. Keadaan Pegawai BBPSIK Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Keterangan
		Orang	%	
1.	Doktor	1	1,00	
2.	Master	22	22,00	
3.	Sarjana	31	31,00	
4.	Sarjana Muda	2	2,00	
5.	SLTA	41	41,00	
6.	SLTP	2	2,00	
7.	SD	1	1,00	
	Jumlah Total Pegawai	100	100,00	

1.1.3. Sarana dan Prasarana

BBPSIK memiliki sarana dan prasarana yang cukup strategis untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya. Sarana dan prasarana yang ada

saat ini merupakan sarana prasarana yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan sebelum berubah nomenklatur dan tupoksinya menjadi BBPSIK. Sarana dan prasarana dimaksud meliputi: Gedung perkantoran, Laboratorium Genetika Molekuler, Laboratorium Kultur Jaringan, Laboratorium Biologi Reproduksi/Benih, Laboratorium Analisa Minyak Atsiri, Laboratorium Sifat Fisika dan Kimia Kayu, Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman Hutan, Laboratorium Bioenergi, Perpustakaan, Jaringan Komputer (*Local Area Network*), Website, Internet. BBPSIK juga diberikan mandat untuk mengelola 6 (enam) Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai laboratorium lapangan untuk menguji dan memvalidasi standar instrumen khususnya di bidang kehutanan yaitu: KHDTK Playen Gunungkidul, KHDTK Watusipat Gunungkidul, KHDTK Kaliurang, KHDTK Wonogiri, KHDTK Sumberwringin Bondowoso, dan KHDTK Padekanmalang Situbondo.

1.2 Capaian Kegiatan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Tahun 2020-2021

Capaian Kegiatan BBPSIK Tahun 2020-2021 yang disajikan adalah capaian kegiatan dari institusi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan (BBPPBPTH) mengingat institusi BBPSIK baru ditetapkan per 26 Desember 2021. Pada DIPA BBPPBPTH Tahun 2020 - 2021 terdapat 2 (dua) program yang diampu yaitu: (1) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan (2) Program Dukungan Manajemen. Tugas pokok BBPPBPTH ketika itu adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang bioteknologi hutan dan pemuliaan tanaman hutan, konservasi sumberdaya genetik, silvikultur dan hama penyakit untuk peningkatan produktifitas hutan. Adapun capaian dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang merupakan kegiatan yang masuk dalam program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Capaian Kegiatan Penelitian dan Pengembangan BBPPBPTH Tahun 2020 -2021

No.	Kegiatan	Capaian	Ket
1	Konservasi Untuk Jenis Kayu Kuku dan Kayu Merah	Data dan informasi hasil evaluasi pertumbuhan tanaman: 1. Plot konservasi <i>ex situ</i> kayu kuku di KHDTK Watusipat dan Petak 95 Playen Gunung Kidul masing-masing seluas 1,5 dan 1,3 ha 2. Plot konservasi <i>ex situ</i> kayu merah di Petak 95 Gunung Kidul seluas 1,2 ha	
2	Studi Potensi Taxol dari <i>Taxus sumatrana</i> dalam rangka Kemandirian Obat Kemoterapi dari Tanaman Lokal Indonesia	1. Penanda DNA menunjukkan nilai keragaman genetik <i>T. sumatrana</i> termasuk sedang 2. Peta genetik menunjukan bahwa populasi Singgalang memiliki nilai keragaman genetik yang paling rendah. 3. Populasi yang diprioritaskan untuk dikonservasi adalah Singgalang karena mempunyai nilai keragaman genetik yang paling rendah; dan Sibuaton karena memiliki alel privat yang mencirikan populasi	
3	Peningkatan Produktivitas Kayu Pertukangan melalui Pemuliaan Jenis Mahoni, Gmelina, Manglid, Tisuk untuk Mendukung Industri Kayu	Data dan informasi hasil evaluasi pertumbuhan tanaman plot uji keturunan jenis-jenis kayu pertukangan di Trenggalek, Jawa Timur: 1. Plot uji keturunan Mahoni di Trenggalek, Jawa Timur seluas 1 hektar 2. Plot uji keturunan Gmelina di Trenggalek, Jawa Timur seluas 1 hektar 3. Plot uji keturunan Manglid di Trenggalek, Jawa Timur seluas 1 hektar 4. Plot uji keturunan Warugunung (Tisuk) di Trenggalek, Jawa Timur seluas 1 hektar	
4	Bioprospecting Araukaria dan Pulai untuk Kemanfaatan Bahan Baku Industri Biofarmaka	-	Kegiatan tidak terlaksana sebagai dampak <i>refocusing</i> anggaran untuk penanganan dan pencegahan Covid-19
5	Teknologi Konservasi Sumberdaya Genetik dan Pemuliaan Jenis Potensial pada Lahan Gambut	1. Plot KSDG jenis Gelam di Kemanpo, Sumatra Selatan 2. Data dan informasi evaluasi pertumbuhan tanaman pada umur 2 tahun di plot KSDG Gelam Kemanpo, Sumatera Selatan	
6	Konservasi Sumberdaya Genetik Timoho (<i>Kleinhovia hospita</i> L) sebagai Jenis	1. Peta Sebaran Timoho di DIY 2. Plot konservasi Timoho bekerjasama dengan kelompok masyarakat di Desa Kepuh Harjo, Cangkringan dengan luas inti 0,5 ha	

No.	Kegiatan	Capaian	Ket
	Tanama Khas DIY		
7	Pemuliaan Surian (<i>Toona sinensis</i> ROEM dan <i>Toona Sureni</i> MERR) untuk Mendukung Produktivitas Bahan Baku Kayu Pertukangan	<ol style="list-style-type: none"> Telah dikuasai pengujian awal berupa teknik klonal melalui air layering media cair dan media padat Penyiapan materi klonal dari 30 pohon induk surian dalam rangka pembangunan persemaian teknik klonal di BBPPBPTH. Materi genetik diperoleh dari: <ol style="list-style-type: none"> Plot Konservasi eksitu <i>Toona sinensis</i> Roem. dan <i>Toona sureni</i> Merr di Petak 17c, BKPH Candirotto, KPH Kedu Utara dan Petak 24i, RPH Petung, BKPH Candirotto, KPH Kedu Utara Plot Uji Keturunan <i>Toona sinensis</i> Roem di Klampok, No: 34-A, Dusun Ngaliyan – BKPH Candirotto 	
8	Teknik Perbanyak Mikro Masoyi (<i>Cryptocarya massoia</i>) untuk Penyediaan Individu Unggul dan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> Telah diperoleh metodologi sterilisasi eksplan daun Telah diperoleh media induksi untuk pertumbuhan kalus Masoyi 	
9	Perakitan Varietas Baru Kayuputih dalam Perhutanan Klon untuk Optimalisasi Manajemen Pertanaman dan Akselerasi Peningkatan Produksi Minyak Kayuputih	<ol style="list-style-type: none"> Telah tersedia stek pucuk kayuputih dari klon unggul sebagai pendukung pembangunan uji klon Penetapan calon lokasi pembangunan uji klon di Petak 93 Playen Gunungkidul (pembangunan direncanakan tahun 2022) 	
10	Pengembangan Kayuputih Unggul sebagai Model Industri Kayuputih Skala Kecil untuk Meningkatkan Produksi Minyak Kayuputih Skala Nasional	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan kayuputih unggul skala industri kecil telah dilakukan di Biak Numfor seluas 5 ha. Proses penyulingan dilakukan rutin dan hasil penjualan minyak kayuputih telah dirasakan manfaatnya oleh kelompok tani setempat Plot pengembangan seluas 2 Ha di Desa Dadapan, Kec. Solokuro Kab Lamongan 	
11	Pembangunan Klon Unggul Nyawai (<i>Ficus variegata</i> Blume)	Perbanyak materi nyawai terseleksi dilakukan dengan cangkok sebanyak 499 bibit dari 30 klon unggul untuk mendukung penyiapan materi pembangunan uji klon nyawai	
12	Pengembangan	1. Plot uji keturunan jenis <i>A. auriculiformis</i> ,	

No.	Kegiatan	Capaian	Ket
	Kaliandra, Akor dan Lamtoro Unggul untuk Sumber Energi Biomasa Kayu Berkualitas Tinggi untuk Industri serta untuk Kebutuhan Masyarakat	kaliandra dan lamtoro gung di Sumatera hasil kerjasama dengan PT. Musi Hutan Persada 2. Persiapan sampel kayu hasil seleksi untuk pengujian: a. Analisa kalor b. Analisa kandungan lignin, berat jenis dan panjang serat	
13	Aplikasi Bioforensik untuk Flora dan Fauna Dilindungi dari Perburuan dan Perdagangan Ilegal	Hasil optimasi PCR menggunakan penanda SSR yang dikembangkan dari <i>Intsia palembanica</i> dari Malaysia mampu mengamplifikasi DNA target jenis-jenis <i>Intsia spp.</i> dari Indonesia	
14	Reintroduksi dan Pembangunan Kebun Benih Klon Unggul Cendana (<i>Santalum album</i> Linn)	1. Telah diketahui adanya variasi kadar santalol antar provenans maupun dalam provenans cendana (dari 90 individu yang diuji, 17 individu/klon memiliki kandungan santalol relatif yang bervariasi pada kisaran 0,41%-85%) 2. Bibit cendana 5 klon dari teknik grafting dan 5 klon dari teknik kultur jaringan.	
15	Pembangunan Populasi Dasar untuk Mendukung Pengembangan Aren (<i>Arenga pinnata</i> MERR) sebagai Bahan Baku Bioetanol	-	Kegiatan tidak terlaksana sebagai dampak <i>refocusing</i> anggaran untuk penanganan dan pencegahan Covid-19
16	Pengembangan Klon Jati pada Hutan Rakyat	1. Telah dikuasainya teknik perbanyakan vegetatif klon-klon jati hasil seleksi pada uji klon jati di Gunungkidul dan Wonogiri dengan teknik okulasi untuk pembangunan kebun pangkas jati. 2. Perbanyakan tanaman melalui stek pucuk dari kebun pangkas jati di arboretum BBPPBPTH 3. Data dan informasi hasil evaluasi pertumbuhan demplot klon jati hasil kultur jaringan di Saptosari, Gunungkidul	
17	Perakitan Varietas Baru Tanaman Hutan sebagai Bahan Baku untuk Peningkatan Produktivitas Industri Berbasis Serat (Pulp, Kertas dan Rayon)	1. Kebun persilangan (<i>breeding garden</i>) <i>Acacia spp</i> di BBPPBPTH menggunakan metode <i>potting/planterbag</i> 2. Telah diperoleh hak PVT untuk varietas Purwo Bersinar Ep 006, Ep 007, Ep 014 (varietas dari jenis <i>Eucalyptus pellita</i>) dan Purwo Sri Ah 044 (varietas dari jenis hybrid <i>Acacia</i> persilangan <i>A. mangium</i> x <i>A. auriculiformis</i>). 3. Hasil cangkokan pohon plus sebanyak 14 famili di KBSUK F-2 KHDTK Gunungkidul, Playen, DI Yogyakarta	

No.	Kegiatan	Capaian	Ket
18	Pengembangan Sengon Toleran Unggul untuk Mendukung Industri dan Hutan Rakyat di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi supervisi dan evaluasi tanaman <ol style="list-style-type: none"> a. KBS sengon generasi kedua seluas 5 Ha, jarak tanam 5 x 5 m, desain RCBD single terletak di perkebunan PT SSP, Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri Jawa Timur. tree plot, jumlah family 50 yang berasal dr KBS generai pertama di Lumajang Jawa Timur, jumlah ulangan 18, di tanam akhir tahun 2019. b. KBS seluas 1,4 Ha, jarak tanam 3 x 2 m, desain RCBD dengan tiga tree plot, 6 ulangan, ditanam akhir tahun 2019, c. APB seluas 1,0 Ha, jarak tanam 3 x 3 m, terletak di lahan Kelompok Tani Desa Blimbing, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri Jawa Timur, ditanam akhir tahun 2019. d. KBS Sengon F2 kerjasama BBPPBPTH dengan BPDASHL Baturusa Cerucuk, Provinsi Bangka Belitung, seluas 5 Ha, jarak tanam 5 x 5 m, desain RCBD single tree plot, jumlah family 50 yang berasal dr KBS generai pertama di Lumajang Jawa Timur, jumlah ulangan 18, di tanam akhir tahun 2019 2. APB dan KBS generasi kedua tahun tanam 2021 di dusun Gondosuli, Desa Puspo, Kecamatan Puspo, Kab Pasuruan, rancangan yang digunakan RCBD, 3 tree plot, 6 ulangan dan jarak tanam 3 x 2 m. 3. KBS generasi kedua tahun tanam 2021 seluas 5 Ha di kampus Institut Teknologi Sumatera (Itera) yang berlokasi di Bandar Lampung, merupakan hasil kerjasama antara Itera, BPDASHL Way Seputih Way Sekampung dan BBPPBPTH. Penanaman menggunakan desain RCDB, 59 family, single tree plot, jarak tanam 5 x 5 m dengan jumlah blok 38 blok. 4. KBS generasi kedua tahun tanam 2021 seluas 8 Ha, yang berlokasi di Desa Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, merupakan kerjasama antara UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Kalimantan Selatan dan 	

No.	Kegiatan	Capaian	Ket
		BBPPBPTH. Penanaman menggunakan 50 family, single tree plot, 54 blok, jarak tanam 5 x 5 m.	
19	Pemuliaan Generasi Tingkat Lanjut Sengon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bibit di persemaian sengon untuk pembangunan KBS Sengon di KHDTK Wonogiri 2. Data dan informasi hasil evaluasi KBS Sengon F2 di Pasuruan 	
20	Pemuliaan Tingkat Lanjut Jenis Nyamplung dan Malapari untuk Bahan Baku Biofuel	<p>Data dan informasi plot tegakan benih provenan nyamplung (TBP) tahap 1 asal Gunung Kidul (DIY) di KHDTK Wonogiri (Jawa Tengah):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuaian pada TBP nyamplung dipengaruhi oleh kondisi tajuk yang semakin rapat 2. Potensi rendemen minyak pada kandidat pohon plus TBP nyamplung berkisar 60,08% (pohon no 193) hingga 80,85% (pohon no 55), dengan rerata keseluruhan sebesar 71,21%. 3. Perbanyak vegetatif berupa sambungan/grafting pada kandidat pohon plus di Wonogiri bervariasi terhadap persentase hidup berkisar 30-100% (umur 1 bulan) dan 15-100% (umur 2 bulan). Skoring pertumbuhan berkisar antara 7,00 (pohon nomor 36) hingga 19,75 (pohon nomor 114). 	
21	Pengembangan Prototipe Laik Industri Melalui Sinergi dan Hilirisasi Industri Berbasis Produk Unggulan Hasil Pemuliaan Tanaman untuk Peningkatan Produktivitas Industri Pulp dan Kertas Menuju Green Industry	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plot <i>demo plantation</i> varietas unggul jenis <i>E. pellita</i> (Purwo Bersinar Ep006, Purwo Bersinar Ep007, Purwo Bersinar Ep014) hasil perbanyak menggunakan teknik kultur jaringan seluas kurang lebih 0,5 ha di KHDTK Wonogiri 2. Perbanyak bibit untuk mendukung pembangunan prototype yang direncanakan di beberapa lokasi di Sumatera dan Kalimantan bekerja sama dengan mitra industry pulp/kertas 	
22	Konservasi Rotan Melalui Perbanyak Invitro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perkecambahan biji rotan jernang (<i>D. draco</i>) mencapai 100 % pada semua perlakuan sterilan. 2. Semua perlakuan BA yang digunakan untuk sub kultur tunas, belum menghasilkan tunas ganda sampai umur 7 minggu 	

1.3 Permasalahan dan Potensi

BBPSIK sebagai organisasi baru setingkat eselon IIb dengan cakupan wilayah kerja seluruh Indonesia diberi mandat untuk memastikan instrumen-instrumen standar khususnya di bidang kehutanan tersebut layak untuk diimplementasikan, dapat diterapkan di lapangan oleh para pelaku usaha, dan memastikan instrumen standar tersebut dapat diterima oleh para pelaku usaha di lapangan dalam artian tidak mempersulit para pelaku usaha. Dalam melaksanakan mandat tersebut sebagai lembaga yang baru lahir banyak menemukan beberapa kendala. Identifikasi permasalahan yang ditemukan melalui diagnosis terdapat tiga masalah utama di BBPPBPTH antara lain: Pemanfaatan KHDTK/HP dan laboratorium belum optimal; Aksesibilitas informasi IPTEK dan produk hasil litbang dan inovasi oleh pengguna belum optimal; Layanan publik manual, online statis, tidak responsive dan tidak interaktif.

Identifikasi lingkungan baik internal maupun eksternal dilakukan untuk memprediksi sejauh mana faktor lingkungan berpengaruh terhadap proses unit kerja BBPSIK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan analisis SWOT kondisi BBPSIK dapat digambarkan sebagaimana berikut.

1.3.1 Internal Kekuatan BBPSIK (*Strengths*)

Faktor lingkungan internal kekuatan (*strength*) yang dimiliki BBPSIK yaitu (1) BBPSIK telah ditetapkan sebagai institusi yang melakukan pemantauan dan verifikasi standar instrumen dengan wilayah kerja seluruh Indonesia; (2) Jumlah sumberdaya manusia dengan tingkat pendidikan yang beragam; (3) Sarana prasarana yang dimiliki berupa bangunan kantor (gedung), beberapa laboratorium, perpustakaan, jaringan komputer (*Local Area Network*), website dan internet; (4) Media publikasi (Jurnal Pemuliaan Tanaman Hutan, Wana Benih dan Infotek) yang bisa didaya gunakan peruntukannya untuk sarana media informasi (meskipun perlu dilakukan pergantian ruang lingkupnya dari informasi ke-litbangan ke informasi

standar instrumen); (5) Sarana kekuatan lain yang dapat dipergunakan sebagai validasi NSPK maupun SNI ataupun aturan perundangan lainnya adalah keberadaan 6 (enam) Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang dulunya merupakan laboratorium lapangan dalam mengimplementasikan kegiatan ke-litbangan yang terletak di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo; dan (7) Sinergi yang cukup baik antara peneliti yang memilih beralih ke BRIN dengan SDM yang ada di BBPSIK tentu tidak bisa dilepaskan dari rekam jejak perjalanan dalam kebersamaan membangun kegiatan kelitbangan.

1.3.2 Faktor Internal Kelemahan BBPSIK (*weaknesses*)

Identifikasi lingkungan dari sisi kelemahan (*weakness*) yang teridentifikasi adalah sumberdaya manusia (SDM). Sumberdaya manusia yang ada merupakan sumberdaya manusia dengan jabatan struktural, ada sebagian yang semula dari jabatan fungsional peneliti dan teknisi yang beralih jabatan fungsionalnya ke dalam jabatan yang ada dalam struktur BBPSIK, di samping itu dalam rangka penyederhanaan birokrasi juga terdapat jabatan fungsional yang merupakan jabatan baru melalui penyetaraan, serta jabatan fungsional umum (pelaksana). Hal ini tentu berdampak kepada belum optimalnya kompetensi atau pengetahuan yang cukup dari sisi sumberdaya manusia dalam membangun standar instrumen untuk mendukung tugas dan fungsi BBPSIK, sisi lain belum terbangunnya proses bisnis mengingat saat ini BSILHK sendiri masih dalam proses pengembangan mengerjakan tugas dan fungsinya. Kelemahan lain yaitu masih belum terbangunnya database terkait standar instrumen, serta belum dikenalnya institusi BBPSIK oleh banyak stakeholders.

1.3.3 Faktor Eksternal Peluang BBPSIK (*Opportunities*)

Sementara identifikasi peluang (*opportunities*) yang cukup besar adalah membangun jejaring dengan stakeholders, hasil penelitian dan pengembangan dijadikan bahan atau pondasi pengusulan ataupun review dari standar instrumen yang ada ataupun yang masih akan disusun, dengan posisi ini selayaknya hasil penelitian dan pengembangan bisa diaplikasikan serta memandu stakeholders untuk menggunakan hasil penelitian dan pengembangan melalui standar instrumen.

1.3.4 Faktor Eksternal Tantangan BBPSIK (*Opportunities*)

Identifikasi lain yaitu faktor tantangan (*threats*) dari lingkungan adalah sebagai organisasi baru tentunya masih akan menghadapi kekurangpercayaan dari stakeholders, tuntutan stakeholders yang cepat terhadap standar instrumen yang harus segera dipenuhi.

<p>Unit: Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan</p>	<p>Strength (kekuatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah ditetapkan sebagai institusi yang melakukan tindakan pemantauan dan verifikasi standar instrumen dengan wilayah kerja seluruh Indonesia ✓ Sarana prasarana yang cukup memadai ✓ Tingkat pendidikan SDM beragam ✓ Sinergi yang baik antara peneliti yang ke BRIN dan SDM di BBPSIK 	<p>Weakness (kelemahan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sebagai institusi baru tentu masih belum banyak dikenal stakeholder ✓ SDM belum cukup berkompetensi ✓ Belum terbangun data base SI ✓ BSILHK dalam proses tahap pengembangan mengerjakan tugas dan fungsinya. 	
<p>Opportunities (peluang)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jejaring kerja dengan stakeholders dalam rangka penguatan komunikasi ✓ Hasil riset sebagai bahan atau pondasi dalam mendukung penyusunan SI <p>Threat (tantangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kurangnya kepercayaan stakeholders terhadap organisasi baru ✓ Tuntutan yang cepat terhadap SI yang harus segera terpenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemanfaatan hasil riset sebagai tantangan untuk mampu menjawab kebutuhan SI Eselon 1 lainnya ✓ Penguatan kolaborasi kegiatan dalam mengembangkan sarana dan prasarana <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemantapan Struktur Organisasi Baru ✓ Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif bagi SDM 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Membangun kolaborasi kerjasama dengan stakeholders ✓ Peningkatan kompetensi SDM melalui diklat/pelatihan/ sosialisasi dalam menjawab tantangan era digital ✓ Penguatan sinergi dalam proses pengembangan tugas dan fungsi <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penguatan mekanisme kerjasama ✓ Meningkatkan kualitas dan kuantitas kolaborasi dan atau kerjasama dengan Institusi lain 	<p>Sasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sebagai Institusi yang handal ✓ Tersedianya SI yang diperlukan stakeholders ✓ Terbangunnya data SI ✓ Terbangunnya mekanisme sinergi dan kolaborasi ✓ Kompetensi SDM yang memadai ✓ Terkelolanya sarana dan prasarana ✓ Terfasilitasinya layanan dukungan manajemen terhadap satuan kerja BBPSIK

Gambar 4. Arah Strategi Kebijakan

BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN 2022-2024

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK

Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu *“Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yaitu Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Untuk mewujudkan visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam misi KLHK sebagai berikut:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas.
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan yang akan dicapai oleh KLHK dibagi 4 pilar, yaitu:

1. Pilar Lingkungan: Kondisi lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim;
2. Pilar Ekonomi: Aktualisasi potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Pilar Sosial: Pemanfaatan hutan bagi masyarakat yang berkeadilan;
4. Pilar Tata Kelola: Tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan ber pelayanan prima.

Organisasi Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal 4 (empat) pilar dimaksud, BSILHK mendukung 3 (tiga) pilar tujuan yaitu: pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar tata kelola.

Sasaran Strategis pembangunan KLHK merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan. Rumusan sasaran strategis untuk tingkat KLHK adalah:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;

2. Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah;
3. Menurunnya emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan;
4. Menurunnya laju penyusutan hutan;
5. Meningkatnya ekonomi sirkular dari sampah dan limbah;
6. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan;
7. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting;
8. Meningkatnya penerimaan negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate;
10. Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan;
11. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata;
12. Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas;
13. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang lincah (agile), efektif dan efisien.

2.2 Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program BSILHK

Berdasarkan visi KLHK di atas yang menekankan pada keberlanjutan sumberdaya hutan dan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat, maka dirumuskanlah visi BSILHK yaitu:

“Standardisasi Pemanfaatan Sumberdaya Alam untuk Menjaga Kesehatan Lingkungan Hidup dan Kecukupan Luasan Hutan” dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Sebagai organisasi baru di KLHK, BSILHK didorong agar mampu menyediakan, mengembangkan, menguatkan standar instrumen bidang LHK dalam mengendalikan lingkungan hidup dan kehutanan. Sedangkan

kualitas dapat terus terjaga dan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dapat terkontrol dengan ketat dengan adanya standar yang telah ditetapkan.

Mandat dari Peraturan Menteri LHK Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri LHK Nomor P.26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Misi BSILHK yaitu:

1. Menyusun kebijakan teknis rencana dan program perumusan dan pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Melaksanakan koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
3. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan fasilitasi penerapan standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
4. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan fasilitasi penerapan standar instrumen dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Organisasi BSILHK dalam hal ini mendukung 3 (tiga) pilar tujuan yaitu:

1. Pilar Lingkungan: Kondisi lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim;
2. Pilar Ekonomi: Aktualisasi potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Pilar Tata Kelola: Tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan ber pelayanan prima.

Selain dukungan tiga pilar di atas, BSILHK terlibat dalam 5 (lima) sasaran strategis yaitu:

1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
2. Sasaran Strategis 3: Menurunnya emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan;
3. Sasaran Strategis 4: Menurunnya laju penyusutan hutan;
4. Sasaran Strategis 6: Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan dan;
5. Sasaran Strategis 13: Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien.

Sesuai tugas dan fungsi BSILHK yaitu menyelenggarakan koordinasi dan perumusan, pengembangan serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen dibidang lingkungan hidup dan kehutanan, maka program yang dimiliki oleh KLHK terdiri dari (5) lima program yaitu :

1. Program Kualitas Lingkungan Hidup
2. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
3. Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
5. Program Dukungan Manajemen

Dalam hal ini Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung 4 (empat) program yaitu :

1. Program kualitas Lingkungan Hidup
2. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
3. Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
4. Program Dukungan Manajemen

Adapun sasaran program dan indikator kinerja Program BSILHK sebagaimana pada Tabel 4, 5, 6, 7 dan 8.

Tabel 4. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen BSILHK

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/IKP/IKK)	LOKASI	TARGET					UNIT PELAKSANA	
				SATUAN	2020	2021	2022	2023		2024
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN										
KEGIATAN 6758: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	T4.S2.1.1.1.6 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T4.S2.1.1.1.6.1 Nilai SAKIP pada Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	34 Provinsi	Poin	0	0	79	80	81	SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LHK
		T4.S2.1.1.1.6.2 Level Maturitas SPIP Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	34 Provinsi	Level	0	0	3	4	4	
		T4.S2.1.1.1.6.3 Laporan keuangan Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertib dan akuntabel	34 Provinsi	Dokumen	0	0	1	1	1	

Tabel 5. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Pogram Pengelolaan Hutan Berkelanjutan BSILHK

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/IKP/IKK)	LOKASI	TARGET					UNIT PELAKSANA	
				SATUAN	2020	2021	2022	2023		2024
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN										
KEGIATAN 6761: STANDARDISASI INSTRUMEN PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN	T2.S2.1.3.1.1 Tersedianya standardisasi usaha dan produk yang berkualitas dalam perizinan berusaha bidang kehutanan	T2.S2.1.3.1.1.1 Jumlah Standar Usaha/Produk Bidang Kehutanan	34 Provinsi	NSPK	0	0	1	4	6	Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
		T2.S2.1.3.1.1.1 Jumlah Standar Usaha/Produk Bidang Kehutanan	34 Provinsi	Layanan	0	0	6	10	10	Seluruh Satker BSILHK
		T2.S2.1.3.1.1.1 Jumlah Standar Usaha/Produk Bidang Kehutanan	15 Provinsi	Unit	0	0	38	39	40	Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan 15 Satker daerah
		T2.S2.1.3.1.1.1 Jumlah Standar Usaha/Produk Bidang Kehutanan	1 Provinsi	Unit	0	0	8	8	8	Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/IKP/IKK)	LOKASI	TARGET					UNIT PELAKSANA	
				SATUAN	2020	2021	2022	2023		2024
	T2.S2.1.3.1.2 Meningkatnya kualitas standar instrumen (skema,sistem prosedur dan standar) usaha dan produk dalam perizinan berusaha bidang kehutanan	T2.S2.1.3.1.2.1 Jumlah standar produk bidang Kehutanan yang ditingkatkan kualitasnya	34 Provinsi	Produk	0	0	16	20	23	Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan 15 Satker daerah
		T2.S2.1.3.1.2.1 Jumlah standar produk bidang Kehutanan yang ditingkatkan Kualitasnya	34 Provinsi	Lembaga	0	0	16	20	23	Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan 15 Satker daerah
		T2.S2.1.3.1.2.1 Jumlah standar produk bidang Kehutanan yang ditingkatkan Kualitasnya	3 Provinsi	Kegiatan	0	0	1	1	1	Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
		T2.S2.1.3.1.2.1 Jumlah standar produk bidang Kehutanan yang	34 Provinsi	Layanan	0	0	1	1	1	Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/IKP/IKK)	LOKASI	TARGET					UNIT PELAKSANA	
				SATUAN	2020	2021	2022	2023		2024
		ditingkatkan kualitasnya								Hutan Berkelanjutan

Tabel 6. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Kualitas Lingkungan Hidup BSILHK

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/IKP/IKK)	LOKASI	TARGET					UNIT PELAKSANA	
				SATUAN	2020	2021	2022	2023		2024
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP										
KEGIATAN 6759: STANDARDISASI INSTRUMEN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	T1.S1.1.8.1.1 Tersedianya standar instrumen lingkungan hidup	T1.S1.1.8.1.1.1 Jumlah standar instrumen kualitas lingkungan hidup	34 Provinsi	NSPK	0	0	1	6	8	Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup
		T1.S1.1.8.1.1.1 Jumlah standar instrumen kualitas lingkungan hidup	34 Provinsi	Lembaga	0	0	2	8	10	Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup
		T1.S1.1.8.1.1.1 Jumlah standar instrumen kualitas lingkungan hidup	Provinsi Banten	Unit	0	0	1	1	1	Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/IKP/IKK)	LOKASI	TARGET						UNIT PELAKSANA
				SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	
	T1.S1.1.8.1.2 Meningkatnya kualitas standar instrumen (skema, sistem prosedur dan standar) lingkungan hidup	T1.S1.1.8.1.2.1 Jumlah standar produk bidang kualitas lingkungan hidup yang ditingkatkan kualitasnya	34 Provinsi	Produk	0	0	16	20	23	Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup dan 15 satker daerah
		T1.S1.1.8.1.2.1 Jumlah standar produk bidang kualitas lingkungan hidup yang ditingkatkan kualitasnya	34 Provinsi	Lembaga	0	0	16	20	23	Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup dan 15 satker daerah
		T1.S1.1.8.1.2.1 Jumlah standar produk bidang kualitas lingkungan hidup yang ditingkatkan kualitasnya	Provinsi Banten	Unit	0	0	1	1	1	Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup
		T1.S1.1.8.1.2.1 Jumlah standar produk bidang	Provinsi Banten	Unit	0	0	1	0	0	Pusat Standardisasi Instrumen

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/IKP/IKK)	LOKASI	TARGET						UNIT PELAKSANA
				SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	
		kualitas lingkungan hidup yang ditingkatkan kualitasnya								Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 7. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Fasilitas Penerapan Standar Instrumen LHK

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/IKP/IKK)	LOKASI	TARGET						UNIT PELAKSANA
				SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 6760: FASILITASI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	T2.S1.1.4.1.1 Meningkatnya kapasitas lembaga dalam menerapkan standar instrumen LHK	T2.S1.1.4.1.1.1 Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen LHK	34 Provinsi	Lembaga	0	0	75	375	375	Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		T2.S1.1.4.1.1.1 Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen LHK	34 Provinsi	NSPK	0	0	4	12	12	
		T2.S1.1.4.1.1.1 Jumlah lembaga yang menerapkan standar	34 Provinsi	Kegiatan	0	0	1	12	12	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/IKP/IKK)	LOKASI	TARGET						UNIT PELAKSANA
				SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	
		instrumen LHK								

Tabel 8. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim BSILHK

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/IKP/IKK)	LOKASI	TARGET						UNIT PELAKSANA
				SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM										Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
KEGIATAN 6762: STANDARDISASI INSTRUMEN KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM	T1.S3.1.3.1.1 Menyiapkan standar instrumen ketahanan bencana dan perubahan iklim	T1.S3.1.3.1.1.1 Jumlah standar instrumen ketahanan bencana dan perubahan iklim	34 Provinsi	NSPK	0	0	1	5	8	Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
		T1.S3.1.3.1.1.1 Jumlah standar instrumen ketahanan bencana dan perubahan iklim	Provinsi Jawa Barat	Layanan	0	0	1	5	5	Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/IKP/IKK)	LOKASI	TARGET						UNIT PELAKSANA
				SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	
	T1.S3.1.3.1.2 Meningkatkan kualitas standar instrumen (skema, sistem prosedur dan standar) ketahanan bencana dan perubahan iklim	T1.S3.1.3.1.2.1 Jumlah standar produk bidang ketahanan bencana dan perubahan iklim yang ditingkatkan kualitasnya	34 Provinsi	Produk	0	0	16	35	35	Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim dan 15 Satker daerah
		T1.S3.1.3.1.2.1 Jumlah standar produk bidang ketahanan bencana dan perubahan iklim yang ditingkatkan kualitasnya	34 Provinsi	Produk	0	0	16	35	35	Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim dan 15 Satker daerah

BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan BBPSIK

Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengusung 5 (lima) kegiatan yaitu 1) Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, 2) Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, 3) Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup, 4) Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan 5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan akan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu sebanyak 3 (tiga) kegiatan sebagaimana Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan/Output BBPSIK

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Output	Satuan	Target		
				2022	2023	2024
Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (6761)	Meningkatkan Kualitas Standar Instrumen (skema, sistem, prosedur dan standar) usaha dan produk dalam perizinan berusaha bidang kehutanan	6761.ADA.051. Pengendalian dan Penilaian Standar Produk, Sistem dan Prosedur dan Uji Pelaksanaan Standar Instrumen Produk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Produk	2	2	2
		6761.ADD.051. Pengendalian dan Penilaian Standar Lembaga Pelaksana Standar Instrumen Produk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Lembaga	2	2	2
	Menyiapkan Standardisasi Usaha dan Produk yang Berkualitas	6761.CDK.051 Pengelolaan KHDTK	Unit	6	6	6

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Output	Satuan	Target		
				2022	2023	2024
	Dalam Perizinan Berusaha Bidang Kehutanan	6761.QAH.051 Validasi Standar Hasil Hutan, Jasa Lingkungan, Keanekaragaman Hayati Pengelolaan Hutan di KHDTK	Layanan	1*	1*	1*
Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (6762)	Meningkatkan Kualitas Standar Instrumen (skema, sistem, prosedur dan standar) Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	6762.ADA.051. Pengendalian dan Penilaian Standar Produk, Sistem dan Prosedur dan Uji Kebencanaan dan Perubahan Iklim	Produk	1	1	1
		6762.ADD.051 Pengendalian dan Penilaian Standar Lembaga Pelaksana Instrumen Penanganan Bencana, Adaptasi, dan Mitigasi Perubahan Iklim	Lembaga	1	1	1
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (6758)	Terlaksananya Dukungan Manajemen yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan Prima	6758.EBA.962. Layanan Umum	Layanan	1	1	1
		6758.EBA.962.051 Perencanaan Program dan Kegiatan				
		6758.EBA.962.052 Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Anggaran				
		6758.EBA.962.053 Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja				
		6758.EBA.962.054 Administrasi Keuangan				
		6758.EBA.962.055 Administrasi Tata Usaha, Rumah Tangga dan BMN				

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Output	Satuan	Target		
				2022	2023	2024
		6758.EBA.962.056 Administrasi Kerjasama Teknik				
		6758.EBA.962.057 Pelaksanaan Urusan Kepegawaian				
		6758.EBA.962.058 Pengelolaan Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat				
		6758.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1
		6758.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan				
		6758.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor				
		6758.EBB.951. Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1
		6758.EBB.951.052 Layanan Sarana Internal				

* Kegiatan Prioritas Nasional

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan dalam Restra 2022-2024 melaksanakan 3 (tiga) kegiatan dengan komponen kegiatan atau output sebagai berikut:

1. Kegiatan Standardisasi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang akan menghasilkan output:
 - a) Sebanyak 2 (dua) laporan dengan satuan produk hasil pengendalian dan penilaian standar produk, sistem dan prosedur

dan uji pelaksanaan standar instrumen produk pengelolaan hutan berkelanjutan.

- b) Sebanyak 2 (dua) laporan dengan satuan lembaga hasil pengendalian dan penilaian standar lembaga pelaksana standar instrumen produk pengelolaan hutan berkelanjutan
- c) Sebanyak 6 (enam) unit laporan hasil pengelolaan KHDTK yang meliputi KHDTK Gunung Kidul Blok Playen, Daerah Istimewa Yogyakarta, KHDTK Gunung Kidul Blok Watusipat, Daerah Istimewa Yogyakarta, KHDTK Kaliurang, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, KHDTK Wonogiri, Jawa Tengah, KHDTK Padekanmalang, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, KHDTK Sumberwringin Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan KHDTK diantaranya adalah komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat sekitar, pemeliharaan KHDTK, pengaman dan patroli rutin di lokasi KHDTK. Untuk 6 (enam) KHDTK yang ada di bawah BBPSIK telah disusun Rencana Pengelolaan Jangka Panjang nya pada tahun 2020 dimana RPJP dimaksud disusun untuk jangka 20 tahun (uraian pada setiap KHDTK secara garis besar sebagaimana lampiran.
- d) Sebanyak 1 (satu) laporan hasil Validasi Standar Hasil Hutan, Jasa Lingkungan, Keanekaragaman Hayati Pengelolaan Hutan di KHDTK Sumberwringin dengan berkolaborasi antara Satuan Kerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan, Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup (PSIKLH) dan Pusat Standarisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (PSIKBPI), dimana kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas nasional.
- e) Sarana dan prasarana yang dimiliki BBPSIK berupa laboratorium sampai dengan saat ini termasuk kategori baik, dapat difungsikan digunakan untuk mendukung pengujian standar.

Laboratorium dimaksud yaitu Laboratorium Genetika Molekuler, Laboratorium Kultur Jaringan, Laboratorium Biologi Reproduksi/Benih, Laboratorium Analisa Minyak Atsiri, Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman Hutan serta Laboratorium Bioenergi.

2. Kegiatan Standarisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim yang akan menghasilkan output:
 - a) Sebanyak 1 (satu) laporan dengan satuan produk hasil pengendalian dan penilaian standar produk, sistem dan prosedur dan uji kebencanaan dan perubahan iklim
 - b) Sebanyak 1 (satu) laporan lembaga hasil pengendalian dan penilaian standar lembaga pelaksana instrumen penanganan bencana, adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim.
3. Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan menghasilkan output:
 - a) Layanan Umum yang akan menyajikan sebanyak 8 (delapan) laporan meliputi; perencanaan program dan kegiatan, penyusunan dan pelaksanaan rencana anggaran, pemantauan evaluasi dan pelaporan kinerja, administrasi keuangan, administrasi tata usaha rumah tangga dan BMN, administrasi kerjasama teknik, pelaksanaan urusan kepegawaian, dan pengelolaan sistem informasi dan hubungan masyarakat.
 - b) Layanan Perkantoran yang akan menyajikan informasi sebanyak 2 (dua) laporan terkait gaji dan tunjangan, dan pemeliharaan kantor.
 - c) Layanan Sarana Internal yang akan menyajikan informasi sebanyak 1 (satu) unit laporan kegiatan.

3.2. Pengarusutamaan

Terdapat 4 (empat) Pengarusutamaan (*mainstreaming*) yang diharapkan dapat menjadi katalisator pembangunan utamanya terkait dengan tugas dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan yaitu dalam menjalankan melakukan pengujian dan validasi standar instrumen dan metode verifikasi penilaian kesesuaian dan tindakan korektif penerapan standar instrumen di bidang kehutanan untuk memastikan penerapan standar instrumen bagi stakeholders di seluruh wilayah Indonesia.

3.2.1 Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mengakomodasi kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan partisipasi dan kerjasama dari berbagai pihak atau stakeholrdes.

3.2.2 Pengarusutamaan Gender

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan. Pengarusutamaan Gender adalah sebuah proses teknis dan politis yang membutuhkan perubahan pada kultur atau watak organisasi, tujuan, struktur dan pengalokasian sumberdaya untuk memastikan perempuan dan laki-laki menikmati manfaat pembangunan secara adil dan merata. Proses teknis dan politis ini dimulai sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki diberbagai bidang pembangunan nasional dan daerah.

Tujuan PUG adalah mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sehingga tercipta pembangunan yang adil dan merata untuk seluruh Rakyat Indonesia.

3.2.3 Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya adalah melakukan proses perencanaan, penyusunan program dan kebijakan dengan mempertimbangkan kearifan lokal, nilai sosial dan kekayaan budaya di masyarakat. Tujuan pengarusutamaan ini adalah melestarikan nilai-nilai sosial dan kekayaan budaya Indonesia.

3.2.4 Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital di era teknologi informasi sekarang ini mutlak dilakukan agar tidak tertinggal dengan bangsa lain. Sebagaimana yang tertuang dalam Renstra KLHK, strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Sasaran program dan sasaran kegiatan merupakan acuan dari target kinerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan (BBPSIK) untuk mendukung Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mewujudkan kondisi yang akan dicapai secara nyata (Sasaran Strategis) KLHK selama periode 3 (tiga) tahun mendatang. Dimana target tersebut untuk mengejar hasil/dampak dari program yang dilaksanakan dengan sasaran program berfokus pada kegiatan perizinan berusaha bidang kehutanan, pengendalian lingkungan hidup serta penguatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, sedangkan dalam konteks manajemen berfokus pada transparansi, akuntabilitas dan layanan publik.

Sasaran program yang akan menjadi acuan bagi BBPSIK meliputi 3 (tiga) program yaitu; Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, dan Program Dukungan Manajemen. Dari sasaran program akan yang diusung oleh BBPSIK ada 3 (tiga) sasaran kegiatan yaitu; standardisasi instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan, standardisasi instrumen pengelolaan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Sekretariat BSILHK.

Dalam rangka mewujudkan baik sasaran program maupun sasaran kegiatan untuk mencapai keselarasan dalam merealisasikan target kinerja yang merupakan penjelasan mengenai hasil dari satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja baik indikator kinerja dari program (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) beserta komponen kegiatan dari setiap kegiatan, tentu dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maupun dana hibah dan kerjasama pemerintah maupun dengan pihak swasta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk merealisasikan target kinerja dalam renstra

saat ini masih bersumber dari pembiayaan utama yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dengan keterbatasan anggaran, untuk mendukung optimalisasi target kinerja perlu diupayakan sumber pendanaan lainnya, misalnya kerjasama dengan lembaga/kementerian lain serta dari kerjasama dengan mitra baik nasional maupun internasional.

4.1. Target Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

4.1.1 Output Pengendalian dan Penilaian Standar Produk, Sistem dan Prosedur dan Uji Pelaksanaan Standar Instrumen Produk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.

Untuk mendukung pelaksanaan output Pengendalian dan Penilaian Standar Produk, Sistem dan Prosedur dan Uji Pelaksanaan Standar Instrumen Produk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan BBPSIK akan melaksanakan sub kegiatan pengujian dan validasi standar dan instrumen produk pengelolaan hutan berkelanjutan dan kegiatan pengujian dan validasi metode verifikasi penilaian kesesuaian standar dan instrumen produk pengelolaan hutan berkelanjutan (berupa 2 laporan/produk), dengan target dan kerangka pendanaan sebagaimana pada Tabel 10.

Tabel 10. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Pengendalian dan Penilaian Standar Produk, Sistem dan Prosedur dan Uji Pelaksanaan Standar Instrumen Produk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di BBPSIK.

Kegiatan	Satuan	Target			Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pengendalian dan Penilaian Standar Produk, Sistem dan Prosedur dan Uji Pelaksanaan Standar Instrumen Produk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Laporan	2	2	2	100	500	500

4.1.2 Output Pengendalian dan Penilaian Standar Lembaga Pelaksana Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.

Untuk mendukung pelaksanaan capaian output Pengendalian dan Penilaian Standar Lembaga Pelaksana Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan BBPSIK akan melaksanakan sub kegiatan pengujian dan validasi lembaga penerap standar dan instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan dan kegiatan pengujian dan validasi metode verifikasi penilaian kesesuaian lembaga penerap standar dan instrumen produk pengelolaan hutan berkelanjutan (berupa 2 laporan/lembaga), dengan target dan kerangka pendanaan seperti pada Tabel 11.

Tabel 11. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Pengendalian dan Penilaian Standar Lembaga Pelaksana Standar Instrumen Produk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di BBPSIK

Kegiatan	Satuan	Target			Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pengendalian dan Penilaian Standar Lembaga Pelaksana Standar Instrumen Produk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Laporan	2	2	2	100	500	500

4.1.3 Output Pengelolaan KHDTK

Untuk mendukung capaian target output Pengelolaan KHDTK, BBPSIK mengelola sejumlah 6 (enam) KDHTK (berupa 6 laporan/unit) dengan target kinerja dan kerangka pendanaan seperti tertera pada Tabel 12.

Tabel 12. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Pengelolaan KHDTK

No	Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus	Satuan	Target			Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	KHDTK Gunung Kidul Blok Playen	Laporan	1	1	1	29,240	100	100
2.	KHDTK Gunung Kidul Blok Watusipat	Laporan	1	1	1	25,300	50	50
3.	KHDTK Kaliurang	Laporan	1	1	1	35,560	100	100

No	Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus	Satuan	Target			Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
4.	KHDTK Wonogiri	Laporan	1	1	1	29,300	100	100
5.	KHDTK Padekanmalang	Laporan	1	1	1	27,300	50	50
6.	KHDTK Sumberwringin	Laporan	1	1	1	33,300	100	100

4.1.4 Output Validasi Standar Hasil Hutan, Jasa Lingkungan, dan Keanekaragaman Hayati Pengelolaan Hutan di KHDTK

Untuk mendukung capaian target output Validasi Standar Hasil Hutan, Jasa Lingkungan, dan Keanekaragaman Hayati Pengelolaan Hutan di KHDTK Sumberwringin (berupa 1 laporan/layanan), dimana kegiatan ini ada kolaborasi antara Satuan Kerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan, Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup (PSIKLH) dan Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (PSIKBPI) dan kegiatan ini adalah kegiatan Prioritas Nasional, dengan target kinerja dan kerangka pendanaan sebagaimana pada Tabel 13.

Tabel 13. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Validasi Standar Hasil Hutan, Jasa Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati Pengelolaan Hutan di KHDTK

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus	Satuan	Target			Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
KHDTK Sumberwringin	Laporan	1	1	1	280*	300*	300*

* Kegiatan Prioritas Nasional

4.2. Target Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

4.2.1 Output Pengendalian dan Penilaian Standar Produk, Sistem dan Prosedur dan Uji Kebencanaan dan Perubahan Iklim

Untuk mendukung pelaksanaan output Pengendalian dan Penilaian Standar Produk, Sistem dan Prosedur dan Uji Kebencanaan dan Perubahan Iklim, BBPSIK akan melaksanakan sub kegiatan pengujian dan

validasi standar dan instrumen serta pengujian dan validasi metode verifikasi penilaian kesesuaian standar dan instrumen produk KBPI (berupa 1 laporan/produk), dengan target dan kerangka pendanaan seperti ditampilkan pada Tabel 14.

Tabel 14. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Pengendalian dan Penilaian Standar Produk, Sistem dan Prosedur dan Uji Kebencanaan dan Perubahan Iklim

Kegiatan	Satuan	Target			Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pengendalian dan Penilaian Standar Produk, Sistem dan Prosedur dan Uji Kebencanaan dan Perubahan Iklim	Laporan	1	1	1	50	250	250

4.2.2 Output Pengendalian dan Penilaian Standar Lembaga Pelaksana Instrumen Penanganan Bencana, Adaptasi, dan Mitigasi Perubahan Iklim

Untuk mendukung pelaksanaan output Pengendalian dan Penilaian Standar lembaga Pelaksana Instrumen Penanganan Bencana, Adaptasi, dan Mitigasi Perubahan Iklim, BBPSIK akan melaksanakan sub kegiatan pengujian dan validasi lembaga penerap standar dan instrumen serta pengujian dan validasi lembaga penerap metode verifikasi penilaian kesesuaian standar dan instrumen KBPI (berupa 1 laporan/produk), dengan target dan kerangka pendanaan dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Pengendalian dan Penilaian Standar Lembaga Pelaksana Instrumen Penanganan Bencana, Adaptasi, dan Mitigasi Perubahan Iklim

Kegiatan	Satuan	Target			Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pengendalian dan Penilaian Standar Lembaga Pelaksana Instrumen Penanganan Bencana, Adaptasi, dan Mitigasi Perubahan Iklim	Laporan	1	1	1	50	250	250

4.3. Target Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen merupakan kegiatan pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari BBPSIK, dimana tugas dan fungsi dimaksud berupa Layanan Dukungan Manajemen Internal terdiri dari 3 layanan meliputi: (1) Layanan Umum; (2) Layanan Perkantoran; dan (3) Layanan Sarana dan Prasarana Internal.

4.3.1 Layanan Umum

Layanan Umum memuat 8 (delapan) komponen kegiatan meliputi: (1) Perencanaan Program dan Kegiatan; (2) Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Anggaran; (3) Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja; (4) Administrasi Keuangan; (5) Administrasi Tata Usaha Rumah Tangga dan BMN; (6) Administrasi Kerjasama Teknik; (7) Pelaksanaan Urusan Kepegawaian; dan (8) Pengelolaan Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat.

1) Perencanaan Program dan Kegiatan

Dokumen perencanaan program dan kegiatan diperlukan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan, hal ini dimaksudkan agar kegiatan yang akan dilaksanakan sudah sistematis, tertib dan terarah sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam perencanaan program dan kegiatan perlu dilihat dari sisi pemenuhan dan ketaatan terhadap kebijakan vertikal, menjawab persoalan dan permasalahan terkini, memenuhi kebutuhan pengguna dan mengantisipasi dinamika perkembangan nasional maupun internasional di masa kini maupun akan datang. Indikator dari kegiatan ini antara lain; penyusunan dokumen Renstra, dokumen rencana kinerja, dokumen pengusulan kegiatan, dokumen perjanjian kinerja, dokumen rencana kerja anggaran kementerian/lembaga, sedangkan untuk menambah wawasan kegiatan

dapat dilakukan melalui koordinasi dan konsultasi, rapat koordinasi dengan instansi vertikal maupun melibatkan stakeholders yang lainnya.

Tabel 16. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Perencanaan Program dan Kegiatan

Kegiatan	Satuan	Target			Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Perencanaan Program dan Kegiatan	Laporan	1	1	1	123,750	150	150

2) Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Anggaran

Dokumen penyusunan dan pelaksanaan rencana anggaran diperlukan dalam sebuah organisasi untuk menjembatani dan akselerasi kegiatan dari perencanaan program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan perhitungan besaran anggaran yang diperlukan organisasi untuk mencapai tujuan, hal yang mendasar dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran adalah memperhatikan aturan perundangan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Perdirjen, aturan internal kementerian atau lembaga dll. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran agar optimal dapat dilakukan melalui koordinasi dan konsultasi, rapat koordinasi dengan instansi vertikal maupun melibatkan stakeholders yang lainnya.

Tabel 17. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Anggaran

Kegiatan	Satuan	Target			Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Penyusunan Pelaksanaan Anggaran dan Pelaksanaan Rencana Anggaran	Laporan	1	1	1	45	75	75

3) Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Pemantauan evaluasi dan pelaporan kinerja merupakan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, dan mutlak dipenuhi oleh institusi pemerintah, dimana fungsi dari pemantauan sendiri adalah untuk menjaga

agar seluruh aktivitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Fungsi pemantauan sendiri dituangkan dalam rekaman aktivitas laporan-laporan antara lain; laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester, laporan tahunan dan laporan kinerja maupun laporan yang disampaikan melalui sistem aplikasi dari Kementerian Keuangan maupun Bappenas. Agar memperoleh *feedback* dari kegiatan ini maka kegiatan koordinasi dan konsultasi, rapat koordinasi dengan intansi vertikal maupun melibatkan stakeholders yang lainnya perlu dilakukan secara berkala dalam rangka memperoleh saran, masukan dan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Tabel 18. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Kegiatan	Satuan	Target			Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Laporan	1	1	1	22,500	100	100

4) Administrasi Keuangan

Administrasi keuangan merupakan unit yang memegang peranan penting dalam hal pengelolaan keuangan, penyusunan laporan pengelolaan keuangan baik yang berbasis sistem aplikasi maupun yang tidak berbasis aplikasi. Hal lain yang dilakukan dalam rangka penyusunan laporan keuangan untuk memastikan ketepatannya melalui rekonsiliasi pengelolaan keuangan, serta koordinasi dan konsultasi.

Tabel 19. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Administrasi Keuangan

Kegiatan	Satuan	Target			Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Administrasi Keuangan	Laporan	1	1	1	45	75	75

5) Administrasi Tata Usaha Rumah Tangga dan BMN

Administrasi Tata Usaha Rumah Tangga dan BMN merupakan kegiatan yang terkait dengan penataan atau pengaturan Barang Milik Negara, dimana BMN sendiri merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Unit kegiatan ini untuk mengakomodasi aktivitas pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab BBPSIK sesuai aturan yang berlaku. Pengelolaan sarana prasarana senantiasa diupayakan oleh BBPSIK dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target BBPSIK. Pengembangan dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan maupun pengadaan sarana prasarana, koordinasi dan konsultasi dengan KPKNL/Sekretariat BSILHK/Biro Umum KLHK, dan rekonsiliasi secara berkala dalam rangka memastikan ketepatan BMN.

Tabel 20. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Administrasi Tata Usaha Rumah Tangga dan BMN

Kegiatan	Satuan	Target			Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Administrasi Tata Usaha Rumah Tangga dan BMN	Laporan	1	1	1	22,500	75	75

6) Administrasi Kerjasama Teknik

Kerjasama merupakan katalisator sekaligus akselerator dalam pencapaian target kinerja dalam suatu organisasi. Melalui mitra kerjasama, sebuah institusi dapat meningkatkan eksistensi serta dapat melakukan transfer wawasan sehingga hasil kinerja dapat dirasakan manfaatnya oleh pengguna. Mitra kerjasama yang telah terjalin dengan BBPPBPTH sebelum menjadi BBPSIK berasal dari unsur Pemerintah, BUMN, dan swasta serta lembaga-lembaga dari luar negeri. Hal ini perlu dilakukan penjajagan kembali dengan mitra-mitra kerjasama dimaksud berkenaan dengan

berubahnya tugas pokok dan fungsi dari BBPPBPTH yang melakukan tugas dan fungsi sebagai lembaga riset menjadi BBPSIK dengan tugas dan fungsi terkait dengan standar dan instrumen, atau bisa dilakukan peninjauan (koordinasi dan konsultasi) dengan mitra-mitra baru yang memerlukan standar instrumen terkait dengan usaha atau kegiatannya.

Tabel 21. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Administras Kerjasama Teknik

Kegiatan	Satuan	Target			Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Administrasi Kerjasama Teknik	Laporan	1	1	1	22,500	100	100

7) Pelaksanaan Urusan Kepegawaian

Pelayanan urusan kepegawaian untuk mengakomodasi pelayanan administrasi kepegawaian lingkup BBPSIK, dengan sub kegiatan pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian. Kegiatan kepegawaian sendiri meliputi pemantauan kenaikan pangkat, pengembangan SDM (diklat teknis, sosialisasi, penjejang fungsional, penjejang struktural, pendidikan formal) serta koordinasi dan konsultasi kepegawaian. Sedangkan pelaksanaan tata usaha merupakan kegiatan yang terkait dengan penatausahaan persuratan dan koordinasi serta konsultasi penatausahaan persuratan.

Sub kegiatan lain dari pelaksanaan urusan kepegawaian adalah pelaksanaan sistem pengawasan intern pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan. Kepala Balai Besar telah menetapkan surat keputusan mengenai SPIP di lingkup Balai Besar.

Sub kegiatan lain dalam pelaksanaan urusan kepegawaian yang perlu dipersiapkan adalah kearsipan, mengingat kearsipan merupakan proses kegiatan pengaturan mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan dokumen-dokumen dengan menggunakan sistem tertentu sudah barang tentu sangat diperlukan di BBPSIK. Karena kearsipan memegang peran bagi kelancaran organisasi BBPSIK yang berfungsi sebagai sumber informasi., maka sudah selayaknya kearsipan di BBPSIK diselenggarakan secara optimal.

Tabel 22. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian

Kegiatan	Satuan	Target			Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1. Pelaksanaan Tata Usaha dan Kepegawaian	Laporan	1	1	1	60,750	100	100
2. Pelaksanaan SPIP	Laporan	1	1	1	18	50	50
3. Pengelolaan Kearsipan	Laporan		1	1		20	20

8) Pengelolaan Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat

Pengelolaan Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat terdapat 2 sub kegiatan, yaitu pengelolaan data dan informasi serta penyusunan statistik dan pengelolaan perpustakaan, publikasi dan diseminasi. Pengelolaan data dan informasi serta penyusunan statistik masih di fokuskan kepada penyusunan statistik Balai Besar, serta pengelolaan website, pengelolaan data base, media sosial yang bertujuan untuk mendokumentasi dan memberitakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar dalam rangka menjaga dinamika hubungan dengan masyarakat lainnya (stakeholders). Sub pengelolaan perpustakaan, publikasi dan diseminasi masih terus dikembangkan, mengingat perpustakaan merupakan salah satu sarana sumber informasi penunjang kegiatan pelaksanaan standar instrumen yang dimiliki, yang digunakan oleh

sumberdaya manusia di BBPSIK untuk memperoleh referensi yang mendukung kegiatan tugas dan fungsi. Disamping itu, perpustakaan juga merupakan tempat untuk menyimpan koleksi referensi yang dimiliki Balai Besar. Perpustakaan yang ada BBPSIK selama ini tidak hanya digunakan oleh peneliti internal melainkan juga kalangan eksternal seperti mahasiswa maupun peneliti dari luar dengan koleksi-koleksi yang cukup lengkap mengingat saat itu masih lembaga riset. Berkenaan dengan berubahnya tugas dan fungsi dari institusi sebelumnya, maka koleksi yang ada di perpustakaan BBPSIK sudah sepatutnya untuk ditambah dengan referensi-referensi lain. Publikasi masih menjadi bagian dari kegiatan di BBPSIK sampai dengan renstra disusun mengingat masih ada nya fungsional peneliti yang ada di BBPSIK, karena belum selesai proses administrasi dengan BRIN, publikasi dan diseminasi ini akan menjadi bagian dari BBPSIK meskipun perlu dilakukan pergantian ruang lingkupnya yang dulu menyampaikan informasi ke-litbang ke informasi standar instrumen. Untuk mendukung kegiatan pengelolaan sistem informasi dan hubungan masyarakat upaya koordinasi dan konsultasi dalam rangka tugas perlu lebih di optimalkan.

Tabel 23. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Pengelolaan Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat

Kegiatan	Satuan	Target			Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1. Pengelolaan Data dan Informasi serta Penyusunan Statistik	Laporan	1	1	1	9,040	20	20
2. Pengelolaan Perpustakaan, Publikasi dan Diseminasi	Laporan	1	1	1	80,960	100	100

4.3.2 Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran memuat 2 (dua) komponen kegiatan meliputi:

- (1) Gaji dan Tunjangan; dan (2) Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

a) Gaji dan Tunjangan

Gaji dan tunjangan merupakan kegiatan yang mendukung pembayaran gaji dan tunjangan bagi sumberdaya manusia yang ada di BBPSIK yang meliputi; belanja gaji pokok, belanja pembulatan gaji, belanja tunjangan suami/istri, belanja tunjangan anak, belanja tunjangan strukturan, belanja tunjangan fungsional, belanja tunjangan PPh, belanja tunjangan beras, belanja uang makan, belanja tunjangan umum dan belanja tunjangan khusus/kegiatan/kinerja.

Tabel 24. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Gaji dan Tunjangan

Kegiatan	Satuan	Target			Kerangka Pendanaan (x 1.000 rupiah)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Bulan	12	12	12	17.505.081	10.088.483	10.088.483

b) Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Operasional dan pemeliharaan kantor merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin dalam rangka menunjang perawatan gedung, perawatan sarana gedung, perbaikan pemeliharaan peralatan dan mesin, perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6/10, langganan daya dan jasa, jasa pos dan giro, serta operasional perkantoran.

Tabel 25. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Kegiatan	Satuan	Target			Kerangka Pendanaan (x 1.000 rupiah)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan Kantor	Bulan	12	12	12	2.749.026	3.142.110	3.380.820

4.3.3 Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Layanan sarana dan prasarana internal diperlukan untuk mengembangkan atau menambah sarana dan prasarana yang ada di institusi BBPSIK dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi institusi.

Tabel 26. Capaian Output dan Kerangka Pendanaan Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Kegiatan	Satuan	Target			Kerangka Pendanaan (x 1.000 rupiah)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	100.000	200.000	300.000

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan Tahun 2022-2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisi penjabaran dari Rencana Strategis Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang pelaksanaannya menjadi tanggungjawab Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan. Penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dokumen perencanaan di atasnya agar tidak keluar dari prinsip-prinsip pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Renstra Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan juga merupakan acuan penyelenggaraan kegiatan standar instrumen serta kegiatan lainnya agar lebih terarah dan sistematis. Renstra ini merupakan penyempurnaan dari renstra sebelumnya dengan memperhatikan perubahan kebijakan yang ada terutama berkenaan dengan berubahnya tugas dan fungsi yang semula lembaga riset. Selain sebagai acuan perencanaan, Rencana Strategis juga merupakan bagian dari perangkat evaluasi kinerja instansi. Rencana Strategis ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai bagian dari Laporan Kinerja (LKj) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Jangka Panjang (20 Tahun), KHDTK Gunung Kidul Blok Playen D.I.Yogyakarta, KHDTK Blok Watusipat D.I.Yogyakarta dan KHDTK Kaliurang D.I.Yogyakarta

No	Uraian	Kawasan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)		
		KHDTK Gunung Kidul Blok Playen, D.I.Yogyakarta	KHDTK Gunung Kidul Blok Watusipat, D.I.Yogyakarta	KHDTK Kaliurang, D.I.Yogyakarta
1.	Fungsi Pokok	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Konservasi
2.	Maskot	Minyak atsiri dan daun	Gambar jenis tanaman lokal (cendana dan jati)	Tumbuhan asli merapi dan Gunung Merapi
3.	Branding	Pemberdayaan masyarakat berbasis genetik unggul penghasil atsiri	Konservasi genetik berbasis tanaman lokal pada daerah monsoon	Restorasi ekosistem berbasis genetik di dataran tinggi volcano
4.	Tujuan	Sebagai pedoman untuk memberikan arah dan panduan dalam rangka mewujudkan pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan, pengamanan KHDTK Playen sebagai model pemberdayaan masyarakat berbasis genetik unggul penghasil atsiri dan pemanfaatan KHDTK untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui wisata ilmiah <i>edu-ecotourism</i>	Sebagai pedoman untuk memberikan arah dan panduan dalam rangka mewujudkan pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan, pengamanan KHDTK Watusipat sebagai model konservasi genetik berbasis tanaman lokal pada daerah monsoon dan pemanfaatan KHDTK untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui wisata ilmiah <i>edu-ecotourism</i>	Sebagai pedoman untuk memberikan arah dan panduan dalam rangka mewujudkan pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan, pengamanan KHDTK Kaliurang sebagai model konservasi Restorasi Ekosistem berbasis genetik dataran tinggi volcano dan pemanfaatannya untuk perekonomian masyarakat melalui wisata ilmiah <i>edu-ecotourism</i>
5.	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersusunnya dokumen RPJP KHDTK Playen 2020-2024 ✓ Terwujudnya KHDTK Playen sebagai model pemberdayaan masyarakat berbasis genetik unggul penghasil atsiri 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersusunnya dokumen RPJP KHDTK Watusipat 2020-2024 ✓ Terwujudnya KHDTK Watusipat sebagai model konservasi genetik berbasis tanaman lokal daerah monsoon 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersusunnya dokumen RPJP KHDTK Kaliurang 2020-2024 ✓ Terwujudnya KHDTK Kaliurang sebagai model Restorasi Ekosistem berbasis genetik di dataran tinggi volcano

No	Uraian	Kawasan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)		
		KHDTK Gunung Kidul Blok Playen, D.I.Yogyakarta	KHDTK Gunung Kidul Blok Watusipat, D.I.Yogyakarta	KHDTK Kaliurang, D.I.Yogyakarta
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terwujudnya fungsi KHDTK Playen sebagai kawasan wisata ilmiah <i>edu-ecotourism</i> memberikan sumber PNBP dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan ✓ Tercapainya tata kelola KHDTK Playen yang mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terwujudnya fungsi KHDTK Watusipat sebagai kawasan wisata ilmiah <i>edu-ecotourism</i> memberikan sumber PNBP dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan ✓ Tercapainya tata kelola KHDTK Watusipat yang mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terwujudnya fungsi KHDTK Kaliurang sebagai kawasan wisata ilmiah <i>edu-ecotourism</i> memberikan sumber PNBP dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan ✓ Terciptanya tata kelola KHDTK Kaliurang yang mandiri
6.	Visi	Mewujudkan kawasan hutan sebagai model implementasi pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan genetik unggul penghasil atsiri	Mewujudkan kawasan hutan sebagai sumber genetik jenis-jenis tanaman lokal untuk mendukung peningkatan produktivitas hutan monsoon	Mewujudkan KHDTK Kaliurang sebagai media penelitian, pengembangan IPTEK dan pendidikan restorasi ekosistem dataran tinggi volcano berbasis genetik dan eco edu wisata berbasis masyarakat
7.	Misi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengelola kawasan hutan yang terintegrasi antara fungsi riset dan pengembangan berbasis pemuliaan tanaman hutan untuk komoditas tanaman penghasil atsiri ✓ Menciptakan nilai tambah pengelolaan kawasan hutan untuk kepentingan wisata dan pendidikan/ pelatihan (<i>edu-ecotourism</i>) pada jenis-jenis tanaman penghasil atsiri ✓ Memberdayakan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan kawasan. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengelola kawasan hutan monsoon dengan litbang jenis-jenis tanaman lokal berbasis konservasi genetik dan pemuliaan untuk peningkatan produktivitas tanaman lokal ✓ Memantapkan perlindungan sumber daya genetik, pengamanan, dan pemeliharaan KHDTK Watusipat bersama masyarakat sekitar hutan dan para pihak terkait lainnya ✓ Mengembangkan pemanfaatan melalui pembangunan kelembagaan dan kemitraan dalam rangka pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan sumberdaya genetik dan ekosistem 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengembangkan IPTEK restorasi ekosistem dataran tinggi volcano berbasis genetik ✓ Mengembangkan litbang dan pendidikan lingkungan yang terintegrasi dengan <i>eco tourism</i> berbasis masyarakat ✓ Memantapkan kegiatan penelitian dan pengembangan pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan serta pengamanan KHDTK ✓ Menyebarkan IPTEK hasil kegiatan litbang dan promosi model pengelolaan dan pemanfaatan KHDTK Kaliurang berbasis masyarakat

No	Uraian	Kawasan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)		
		KHDTK Gunung Kidul Blok Playen, D.I.Yogyakarta	KHDTK Gunung Kidul Blok Watusipat, D.I.Yogyakarta	KHDTK Kaliurang, D.I.Yogyakarta
			✓ Menyebarluaskan ipetk hasil litbang, memberikan edukasi/pendidikan dalam hal pengelolaan, perlindungan, pengamanan dan pemanfaatan KHDTK Watusipat kepada masyarakat dan para pihak terkait lainnya.	

Lampiran 2. Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Jangka Panjang (20 Tahun), KHDTK Wonogiri, Jawa Tengah, KHDTK Padekanmalang Situbondo Jawa Timur, KHDTK Sumberwringin Bondowoso Jawa Timur

No	Uraian	Kawasan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)		
		KHDTK Wonogiri Jawa Tengah	KHDTK Padekanmalang, Situbondo Jawa Timur	KHDTK Sumberwringin, Bondowoso Jawa Timur
1.	Fungsi Pokok	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Terbatas
2.	Maskot	Benih Unggul	Jati	Deglupta dan Araucaria
3.	Branding	Produksi benih unggul	Konservasi genetik tanaman hutan pada dataran rendah kering	Pemuliaan dan konservasi genetik ek-situ tanaman hutan pada dataran tinggi
4.	Tujuan	Sebagai pedoman untuk memberikan arah dan panduan dalam rangka mewujudkan pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan, pengamanan dan pemanfaatan KHDTK Wonogiri sebagai model produksi benih unggul berbasis industri kehutanan dan pemanfaatannya untuk perekonomian masyarakat melalui wisata ilmiah <i>edu-ecotourism</i>	Sebagai pedoman untuk memberikan arah panduan dalam rangka mewujudkan pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan, pengamanan KHDTK Padekanmalang sebagai model konservasi genetik tanaman hutan pada dataran rendah kering dan pemanfaatan KHDTK untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui wisata ilmiah <i>edu-ecotourism</i>	Sebagai pedoman untuk membeikan arah panduan dalam rangka mewujudkan pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan, pengamanan KHDTK Sumberwringin sebagai model konservasi genetik ek-situ tanaman hutan pada dataran tinggi dan kawasan ekowisata
5.	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersusunnya dokumen RPJP KHDTK Wonogiri 2020-2024 ✓ Terwujudnya KHDTK Wonogiri sebagai model produksi benih unggul berbasis insdutri kehutanan ✓ Terwujudnya fungsi KHDTK Wonogiri sebagai kawasan wisata ilmiah <i>edu-ecotourism</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersusunnya dokumen RPJP KHDTK Padekanmalang 2020-2024 ✓ Terwujudnya KHDTK Padekanmalang sebagai model konservasi genetik tanaman hutan pada dataran rendah kering ✓ Terwujudnya fungsi KHDTK Padekanmalang sebagai kawasan wisata ilmiah <i>edu-ecotourism</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersusunnya dokumen RPJP KHDTK Sumberwringin 2020-2024 ✓ Terwujudnya KHDTK Sumberwringin sebagai model pemuliaan dan konservasi genetik ek-situ tanaman hutan pada dataran tinggi ✓ Terwujudnya fungsi KHDTK Sumberwringin sebagai kawasan ekowisata

No	Uraian	Kawasan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)		
		KHDTK Wonogiri Jawa Tengah	KHDTK Padekanmalang, Situbondo Jawa Timur	KHDTK Sumberwringin, Bondowoso Jawa Timur
		<p>memberikan sumber PNPB dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan</p> <p>✓ Tercapainya tata kelola KHDTK Wonogiri yang mandiri</p>	<p>memberikan sumber PNPB dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan</p> <p>✓ Tercapainya tata kelola KHDTK Padekanmalang yang mandiri</p>	<p>✓ Terciptanya tata kelola KHDTK Sumberwringin yang mandiri</p>
6.	Visi	Mewujudkan kawasan hutan sebagai jembatan teknologi dan inovasi hasil pemuliaan tanaman hutan unggul untuk mendukung produktivitas bahan baku industri kehutanan	Mewujudkan KHDTK Padekanmalang sebagai kawasan penyangga pendukung pelestarian alam melalui pemuliaan dan konservasi genetik, dan peningkatan produktivitas hutan secara lestari berkelanjutan dengan memadukan kepentingan konservasi dan perekonomian masyarakat melalui wisata ilmiah <i>eco-tourism</i>	Mewujudkan kawasan hutan dataran tinggi sebagai model pemuliaan dan konservasi genetik ek-situ tanaman hutan
7.	Misi	<p>✓ Mengelola kawasan hutan yang terintegrasi antara fungsi riset dan pengembangan berbasis pemuliaan tanaman hutan untuk komoditas tanaman potensial bagi industri kehutanan</p> <p>✓ Menciptakan nilai tambah pengelolaan kawasan hutan untuk kepentingan wisata dan pendidikan/ pelatihan (<i>edu-ecotourism</i>) dalam bidang pemuliaan tanaman hutan</p> <p>✓ Memberdayakan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan kawasan.</p>	<p>✓ Memantapkan pengelolaan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem KHDTK Padekanmalang melalui kegiatan litbang</p> <p>✓ Memantapkan perlindungan sumber daya alam pengamanan, dan pemeliharaan KHDTK Padekanmalang bersama masyarakat sekitar hutan dan para pihak terkait lainnya</p> <p>✓ Mengembangkan pemanfaatan melalui pembangunan kelembagaan dan kemitraan dalam rangka pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan sumberdaya genetik dan ekosistem KHDTK Padekanmalang</p>	<p>✓ Mengelola kawasan hutan yang berbasis riset pemuliaan dan konservasi genetik secara berkelanjutan</p> <p>✓ Menciptakan kawasan hutan untuk kepentingan pendidikan dan ekowisata</p>

No	Uraian	Kawasan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)		
		KHDTK Wonogiri Jawa Tengah	KHDTK Padekanmalang, Situbondo Jawa Timur	KHDTK Sumberwringin, Bondowoso Jawa Timur
			✓ Menyebarluaskan ipetk hasil litbang, memberikan edukasi/pendidikan dalam hal pengelolaan, perlindungan, pengamanan dan pemanfaatan KHDTK Padekanmalang kepada masyarakat dan para pihak terkait lainnya.	

Lampiran 3. Capaian Kegiatan Prioritas Nasional BBPPBPTH “Implementasi IPTEK Hasil Hutan, Jasa Lingkungan, dan Keanekaragaman Hayati” Tahun 2021

No	Kegiatan	Judul	Capaian
1	Implementasi IPTEK Hasil Hutan, Jasa Lingkungan, dan Keanekaragaman Hayati	Optimalisasi Konservasi, Pemanfaatan Sumberdaya Hutan dan Integrasi Wisata Ilmiah Berbasis Masyarakat (BBPPBPTH)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah tersedia daftar informasi 50 jenis tumbuhan penyusun KHDTK Kaliurang: 49 jenis telah teridentifikasi taksonominya dan 1 jenis masih dengan nama lokal 2. Plot arboretum yang berada di Petak 20 KHDTK Kaliurang memiliki luas 2 Ha dengan jenis Tesek (<i>Dodonea viscosa</i>) dan Alo (<i>Ficus racemosa</i>), masing-masing 150 bibit dengan ditanam berselang-seling antar baris dengan jarak tanam 2.5m X 2.5m 3. Kelompok masyarakat mitra (baca: K-mitra) berasal dari pedukuhan Kaliurang timur desa Hargobinangun, khususnya masyarakat sekitar KHDTK Kaliurang dengan jumlah awal 20 orang dari berbagai profesi disesuaikan dengan rencana peran K-mitra tersebut pada rencana pengembangan KHDTK dalam kerangka eco edu wisata 4. Model wisata ilmiah KHDTK Kaliurang telah disusun dan dibahas oleh beberapa pihak berkepentingan dan kelompok mitra dan narasumber 5. Media promosi wisata ilmiah melalui berbagai sarana, baik pamflet, baliho, maupun website dan media sosial: <ol style="list-style-type: none"> a. https://oxygenparkkaliurang.blogspot.com/ b. https://www.facebook.com/100076029265567/posts/113284077882567/ c. https://www.instagram.com/p/CX-rAeDOjTI/?utm_medium=copy_link 6. Sarana prasarana pendukung: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan Jalur Tracking b. Pemasangan Instalasi Air c. Pemasangan Jaringan Listrik d. Pembuatan Prokes (Tempat Cuci Tangan: 3 buah) e. Pembuatan Jembatan Bambu (kurang lebih 4 meter)

No	Kegiatan	Judul	Capaian
			<ul style="list-style-type: none"> f. Pembuatan Gapura (pada batas KHDTK sebelah selatan petak 35 setelah pagar BRC pembatas KHDTK) g. Pembangunan Toilet (berbentuk buah Ocen-ocen sebanyak 2 buah, terletak pada Petak 35) h. Pembangunan Loket (tidak jauh dari gapura) i. Pembangunan Spot Foto (buah Sarangan, buah ocen-ocen (strawberry hutan) dan jembatan bambu “saninten” yang jadi ciri khas di KHDTK) j. Tong sampah (3 buah di sekitar parkir KHDTK Kaliurang)
2		Optimalisasi Konservasi, Pemanfaatan Sumberdaya Hutan dan Integrasi Wisata Ilmiah Berbasis Masyarakat (BPPTPDAS)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Telah diperoleh informasi biofisik dan sosial ekonomi dan kelembagaan wisata di KHDTK Kaliurang: <ul style="list-style-type: none"> a. Lahan KHDTK Kaliurang didominasi oleh jenis tanah andosol, tekstur debu pasir dan memiliki kandungan C dan bahan organik cukup tinggi. b. Kualitas air sungai di sebelah barat KHDTK Kaliurang telah mengalami pencemaran ringan akibat pembuangan air limbah rumah tangga. c. KHDTK Kaliurang memiliki keunikan untuk dijadikan area wisata yakni wisata ilmiah ekosistem hutan dataran tinggi dan kegiatan kehutanan. d. Lembaga yang terkait dengan pengembangan wisata KHDTK Kaliurang yakni Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Museum Merapi, Museum Ulen Sentanu, dan Bumi Merapi. 2. Telah dibangun demplot model pengelolaan DAS di KHDTK Kaliurang yang terdiri dari demplot pengukuran neraca air dan demplot konservasi tanah dan air berupa bangunan pengendali jurang (<i>gully plug</i>) 3. Informasi jumlah pengunjung dan bauran pemasaran Kawasan Wisata Kaliurang: <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah pengunjung kawasan wisata Kaliurang mengalami penurunan sejak tahun 2016 dan kondisi ini diperburuk oleh pandemic Covid 19.

No	Kegiatan	Judul	Capaian
			b. Harga tiket masuk area wisata di Kaliurang antara Rp. 5.000,- - Rp. 100.000,; tergantung dari objek wisata yang ditawarkannya.
3		Optimalisasi Konservasi, Pemanfaatan Sumberdaya Hutan dan Integrasi Wisata Ilmiah Berbasis Masyarakat (P3H)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dibangun PUP sebanyak 2 buah dengan masing-masing PUP terdapat 25 sub plot pengukuran 2. Telah tersedia sistem informasi tumbuhan yang berisi dari data KIP yang dilengkapi dengan portal KIP, laman <i>landing page</i> dan database pengukuran. 3. Data pada portal KIP berasal dari hasil pendataan dan penandaan pohon di KHDTK Kaliurang sebanyak 916 pohon yang tersebar di 38 petak dan diantaranya sebanyak 529 pohon ditandai untuk pembuatan KIP. Dari data tersebut terdapat 53 jenis, 48 marga dan 33 famili serta 135 individu tingkat pohon yang terdapat dalam PUP
4		Optimalisasi Konservasi, Pemanfaatan Sumberdaya Hutan dan Integrasi Wisata Ilmiah Berbasis Masyarakat (BP2TPH)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah terbangun persemaian sederhana dengan kapasitas produksi 4.000-5.000 bibit per tahun yang terdiri dari 8 bedeng dalam area naungan (<i>shaded area</i>) dan 12 bedeng pada area terbuka (<i>open area</i>) 2. Bibit jenis-jenis tanaman hutan dataran tinggi sejumlah 1.019 bibit dari 9 jenis tumbuhan hutan dataran tinggi yaitu <i>Altingia exelsa</i> (rasamala), <i>Toona sureni</i> (suren), <i>Ostodes paniculata</i> (muncang cina), <i>Helicia serrate</i> (mangkoan), <i>Persea rimosa</i> (huru), <i>Syzygium formosum</i> (kopo gede), <i>Schima walichii</i> (puspa), <i>Magnolia glauca</i> (manglid) dan <i>Acer laurinum</i> (mapel lokal) 3. Telah terbentuk calon kelompok masyarakat mitra pengelola persemaian yaitu Kelompok tani FPL Palem (Forum Peduli Lingkungan Pecinta Alam Lereng Merapi). 4. Telah tersedia paket informasi perbenihan dan pembibitan jenis-jenis dataran tinggi khususnya yang tumbuh di KHDTK Kaliurang sejumlah 21 jenis tanaman hutan